

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan antara BBPK Jakarta dengan Lembaga Non-Terakreditasi tahun 2025 menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*), maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum, penyelenggaraan kerja sama ini telah berjalan secara **Sangat Efektif** dan sistematis. Model pengampuan ini terbukti menjadi instrumen strategis yang andal dalam menjembatani kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan di era transformasi kesehatan. BBPK Jakarta berhasil menjalankan perannya sebagai regulator dan penjamin mutu, sehingga lembaga penyelenggara yang belum terakreditasi tetap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dengan standar kualitas yang diakui secara nasional.

- a. Efektivitas Umum: Penyelenggaraan kerja sama berjalan Sangat Efektif. Model pengampuan ini terbukti menjadi instrumen strategis untuk mengakselerasi peningkatan kompetensi SDM Kesehatan nasional dengan tetap menjaga standar mutu yang sudah ditetapkan.
- b. Konteks (*Context*): Memiliki landasan yuridis yang kuat (UU No. 17 Tahun 2023). Kerja sama ini menjadi solusi adaptif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi syarat administratif (SKP/STR) melalui ekosistem digital Plataran Sehat.
- c. Masukan (*Input*): Instrumen penjaminan mutu dan infrastruktur digital sudah memadai. Namun, ditemukan kendala pada kapasitas SDM di lembaga mitra (terutama RSUD dan Organisasi Profesi) akibat peran ganda antara tugas pelayanan dan administrasi pelatihan.

Nismawaty Basri, 2026

Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Dan Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Di BBPK Jakarta Bekerja Sama Dengan Lembaga Non-Terakreditasi Tahun 2025  
UPN VETERAN JAKARTA, FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM MAGISTER  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

- d. Proses (*Process*): Terjadi transformasi peran BBPK Jakarta dari "pemeriksa" menjadi "pendamping teknis". Kendala utama berupa ambang batas registrasi H-30 dan ketidakstabilan sistem digital saat beban trafik tinggi.
- e. Produk (*Product*): Menghasilkan luaran berkualitas tinggi berupa Sertifikat Digital bertanda tangan elektronik (TTE) yang memiliki kepastian hukum instan bagi peserta dan meningkatkan reputasi profesional bagi lembaga mitra.
- f. Capaian Efektivitas: Keterbatasan status akreditasi mitra berhasil dikompensasi melalui mekanisme penjaminan mutu yang ketat dan sistem monitoring *real-time*, sehingga target kompetensi tetap tercapai secara optimal.
- g. Resiliensi Sistem: Terdapat kemampuan adaptasi yang tinggi melalui komunikasi intensif dan asistensi teknis, meskipun terdapat celah pada belum adanya pemberian umpan balik formal (*feedback*) pasca-kegiatan dari regulator kepada mitra.

## V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) serta analisis efektivitas penyelenggaraan, dirumuskan sejumlah saran strategis guna meningkatkan kualitas kolaborasi pengembangan kompetensi SDM Kesehatan di masa depan:

### V.2.1 Bagi BBPK Jakarta (Regulator)

- a. Penyediaan Paket Edukasi Digital: Membuat video tutorial pendek (1–3 menit) dan buku panduan infografis mengenai penggunaan LMS Plataran Sehat untuk memitigasi kendala teknis bagi mitra dan peserta secara preventif.
- b. Implementasi Rapor Kinerja Mitra: Menerbitkan umpan balik formal (Rapor Kinerja) pasca-kegiatan sebagai rujukan bagi lembaga mitra untuk memperbaiki manajemen internal dan akuntabilitas penyelenggaraan mereka.

- c. Penguatan *Help Desk*: Meningkatkan responsivitas layanan bantuan teknis selama masa kritis (registrasi H-30 dan pelaksanaan) guna menjaga kelancaran proses administrasi digital.

#### **V.2.2 Bagi Lembaga Mitra (Pemerintahan, Profesi, dan Swasta)**

- a. Pembentukan Tim Khusus (*Dedicated Team*): Menunjuk staf khusus yang fokus pada administrasi pelatihan untuk menghindari konflik peran ganda dengan tugas pelayanan rutin (terutama di RSUD dan Organisasi Profesi).
- b. Dokumentasi Menuju Akreditasi: Menjadikan seluruh proses kerja sama pengampunan ini sebagai basis data dan bahan evaluasi mandiri untuk segera mengajukan akreditasi lembaga penyelenggara secara mandiri.

#### **V.2.3 Bagi Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan (Kemenkes)**

Stabilitas Infrastruktur IT dengan cara peningkatan kapasitas server dan keandalan sinkronisasi antara LMS Plataran Sehat dengan portal SatuSehat guna menjamin penerbitan sertifikat digital yang akurat dan tepat waktu pada jam sibuk (*peak hours*)/ *height session*.

#### **V.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

- a. Evaluasi Dampak (Level 3 & 4): Meneliti perubahan perilaku kerja peserta dan dampaknya terhadap mutu layanan kesehatan di instansi masing-masing dalam jangka menengah.
- b. Studi Literasi Digital: Memetakan tingkat kesiapan teknologi nakes di daerah untuk pengembangan sistem pelatihan digital yang lebih inklusif.